

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	7
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Koran Tempo	Wawasan
Tribun Jateng	Sindo	Republika	Kompas	

Halaman 1 dan 7

Penyidik akan Cek Karoseri (Dugaan Korupsi BRT)

Dugaan Korupsi BRT

Penyidik akan Cek Karoseri

SEMARANG - Penyidik Polrestabes Semarang akan melakukan pengecekan karoseri di Magelang yang menjadi tempat perakitan delapan armada Bus Rapid Transit (BRT) yang diduga dikorupsi.

Bus yang dulu (untuk koridor IV) itu kan dibuat di karoseri Magelang, tetapi belum jadi. Kemudian dipinjami sama pemerintah. Maka dari itu kami cek ke karoseri, benar apa tidak.

AIPTU ARIEF SETIAWAN
Kasubnit Tipikor Polrestabes Semarang

Baca PENYIDIK ..hal 7

Penyidik akan

dari hal 1

Selain itu, penyidik juga terus memintai keterangan saksi ahli dan koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Tengah.

Kasat Reskrim Polrestabes Semarang, AKBP Wiyono Eko Prasetyo, melalui Kasubnit Tipikor Aiptu Arief Setiawan, mengatakan, pengecekan di karoseri tersebut untuk megumpulkan data tambahan terkait pembuatan armada BRT untuk koridor IV. Pasalnya pembuatan armada BRT tersebut diduga ada hubungannya dengan penyewaan delapan armada BRT untuk dioperasikan di koridor IV.

"Bus yang dulu (untuk koridor IV) itu kan dibuat di karoseri Magelang, tetapi belum jadi. Kemudian dipinjami sama pemerintah. Maka dari itu kami cek ke karoseri, benar apa tidak, terus jadinya kapan dan akan diserahkan ke pemesan kapan," katanya saat dikonfirmasi Jateng Pos, kemarin.

Meski demikian, Arief tidak memaparkan terkait waktu pengecekan tersebut dilakukan. "Untuk waktunya belum bisa kami pastikan, yang jelas kami akan ke sana untuk cari bukti di lapangan. Untuk koridor IV ada sekitar 10 armada. Kami akan cek secepatnya," lanjut Arief.

Terkait pengecekan tersebut penyidik juga akan berkoordinasi dengan beberapa saksi ahli yang telah ditunjuk.

Di antaranya saksi ahli pidana dan juga ahli dari Kementerian Perhubungan. Selain itu pihaknya juga masih berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Dalam hal ini kami akan libatkan saksi ahli. Ahli pidana untuk memperjelas ini korupsi apa tidak, lalu Dirjen Perhubungan untuk menjelaskan aturan-aturan termasuk izin pengoperasian. Untuk kerugian negaran kami koordinasi dengan BPK," jelas Arief. (har)